



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/137/KUM/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/94/KUM/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGHUBUNG APLIKASI LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/55/KUM/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/94/KUM/2022 tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/94/KUM/2022 tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/55/KUM/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/94/KUM/2022 tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/55/KUM/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/94/KUM/2022 tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Aplikasi Layanan

Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/137/KUM/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 188.45/94/KUM/2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGHUBUNG APLIKASI LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

DAFTAR PEJABAT PENGHUBUNG APLIKASI LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
2	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
3	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
4	Kepala Bagian Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
5	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
6	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
7	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
8	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
9	Wakil Direktur Administrasi, Keuangan dan Pendidikan Pelatihan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	Pejabat Penghubung
10	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
11	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
12	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
13	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
14	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
15	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
16	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
17	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
18	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
19	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
20	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
21	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
22	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
23	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
24	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
25	Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
26	Sekretaris Kecamatan Kandungan	Pejabat Penghubung
27	Sekretaris Kecamatan Angkinang	Pejabat Penghubung
28	Sekretaris Kecamatan Simpur	Pejabat Penghubung
29	Sekretaris Kecamatan Daha Selatan	Pejabat Penghubung
30	Sekretaris Kecamatan Telaga Langsat	Pejabat Penghubung
31	Sekretaris Kecamatan Padang Batung	Pejabat Penghubung
32	Sekretaris Kecamatan Sungai Raya	Pejabat Penghubung
33	Sekretaris Kecamatan Kalumpang	Pejabat Penghubung
34	Sekretaris Kecamatan Loksado	Pejabat Penghubung
35	Sekretaris Kecamatan Daha Utara	Pejabat Penghubung
36	Sekretaris Kecamatan Daha Barat	Pejabat Penghubung
37	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
38	Kepala Subbagian Tata Usaha RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pejabat Penghubung
39	Sekretaris Kelurahan Kandungan Utara	Pejabat Penghubung
40	Sekretaris Kelurahan Kandungan Barat	Pejabat Penghubung
41	Sekretaris Kelurahan Kandungan Kota	Pejabat Penghubung
42	Sekretaris Kelurahan Jambu Hilir	Pejabat Penghubung
43	Senior Manager SPI PT. Tirta Amandit (Perseroda)	Pejabat Penghubung

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR